

Ringkasan Eksekutif **KEMISKINAN** Provinsi DKI Jakarta

2016



<https://jakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Ringkasan Eksekutif
KEMISKINAN
Provinsi DKI Jakarta
2016



RINGKASAN EKSEKUTIF KEMISKINAN DKI JAKARTA 2016

No. ISBN : -
No. Publikasi : 31000.1701
Katalog BPS : 3205020.31
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : iv + 6 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting :
Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Desain Kover Oleh :
Bidang IPDS BPS Provinsi DKI Jakarta

Penerbit :
© BPS Provinsi DKI Jakarta

Pencetak :
BPS Provinsi DKI Jakarta

Sumber Ilustrasi : -

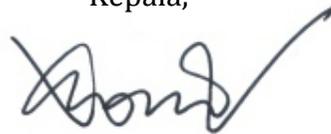
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai instansi pemerintah sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan akan data bagi pemerintah dan juga masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pengguna data secara khusus data terkait angka kemiskinan, BPS Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menyajikan jenis data tersebut dalam bentuk Executive Summary Kemiskinan DKI Jakarta 2018.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, 2017
Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta
Kepala,



THOMAN PARDOSI

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| 1. Umum | 1 |
| 2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan | 2 |
| 3. Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan | 3 |
| 4. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan..... | 5 |

<https://jakarta.bps.go.id>

Executive Summary

Kondisi Kemiskinan di DKI Jakarta

Tahun 2016

1. UMUM

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan
2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
4. Hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Konsep ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal perkapita perhari yang dalam penelitannya diwakili oleh paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi. Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang diwakili oleh 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis non makanan di pedesaan.

Pendekatan makanan dan non makanan ini pertama kali dilakukan oleh Seeborn Rowtree pada tahun 1901 dan 1936 dalam suatu studi kemiskinan di Kota New York. Selanjutnya meluas digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Ketika disparitas kemakmuran antara negara kaya dan negara berkembang semakin melebar, FAO merekomendasikan 2.100 kkalori plus kebutuhan dasar non makanan untuk negara berkembang.

Pendekatan penggunaan 2.100 kkalori ini tidak hanya digunakan oleh Indonesia saja tetapi juga digunakan oleh banyak negara berkembang lainnya seperti Thailand (urban, rural), Vietnam (urban, rural), India (2.100 kkal urban, 2.400 kkal rural), Bangladesh (2.112 kkal urban, rural), Pakistan (2.295 kkal urban, 2.550 kkal rural). Negara berkembang lainnya umumnya juga menggunakan 2.100 kkalori. Sementara untuk negara-negara maju pendekatannya sangat variatif.

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan gabungan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, karena kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Berasnya garis kemiskinan ini berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota dan berbeda untuk setiap tahun. Pada umumnya setiap tahun garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan karena inflasi. Semakin banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan semakin besar jumlah penduduk miskin, dan semakin sedikit jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan maka akan semakin sedikit jumlah penduduk miskin.

Data kemiskinan dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun. Jumlah sampel sebanyak 5.200 rumah tangga yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Survei ini dilaksanakan berdasarkan domisili dan tidak melihat identitas kependudukan yang dimiliki oleh responden, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain sebagainya.

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode September 2015-Maret 2016-September 2016 terus mengalami peningkatan. Selama periode September 2015-September 2016 naik 17,17 ribu orang dan Maret 2016-September 2016 naik 1,54 ribu orang. Secara persentase, selama periode tersebut relatif stagnan, walaupun dari September 2015 ke Maret 2016 naik 0,14 poin, sedangkan periode Maret 2016-September 2016 tidak ada perubahan (Tabel 1).

Sementara untuk garis kemiskinan selama periode tersebut juga terus meningkat. Selama September 2015-Maret 2016-September 2016, garis kemiskinan naik sebesar 2,02 persen dari Maret 2016-September 2016 (dari Rp 510.359 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan), dan naik sebesar 3,51 persen dari September 2015-September 2016 (dari Rp 503.038 per kapita per bulan

menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode Maret–September 2016, sumbangan GKM terhadap GK mengalami perubahan yaitu mengalami penurunan sebesar 0,26 poin.

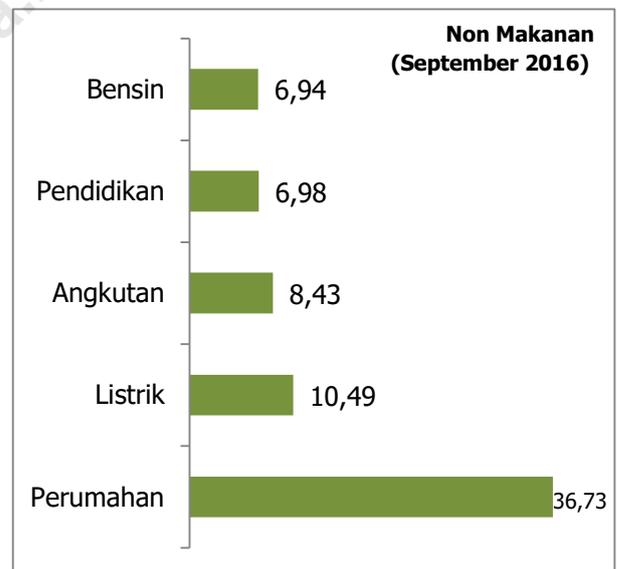
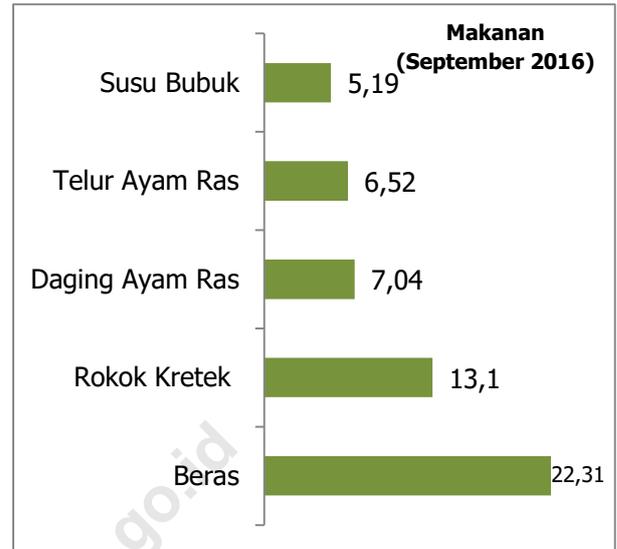
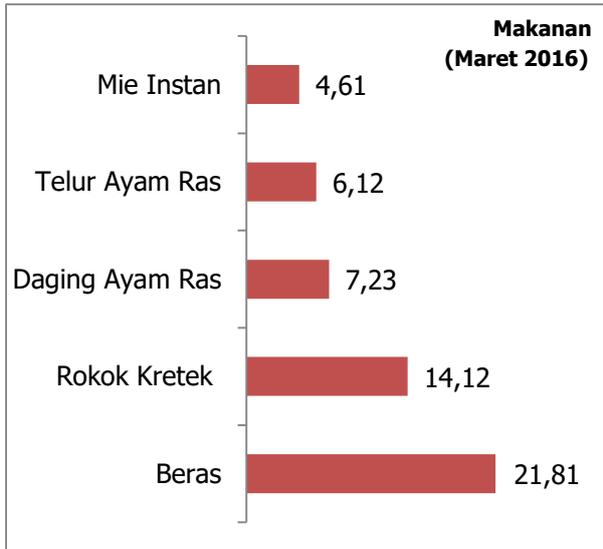
Tabel 1.
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
di DKI Jakarta September 2015 - Maret 2016 - September 2016

| Bulan | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | | | Jumlah penduduk miskin (000) | Persentase penduduk miskin |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Makanan | Bukan Makanan | Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| September 2015 | 327.678 <i>(65,14%)</i> | 175.361 <i>(34,86%)</i> | 503.038 <i>(100%)</i> | 368,67 | 3,61 |
| Maret 2016 | 329.644 <i>(64,59%)</i> | 180.715 <i>(35,41%)</i> | 510.359 <i>(100%)</i> | 384,30 | 3,75 |
| September 2016 | 334.938 <i>(64,33%)</i> | 185.752 <i>(35,67%)</i> | 520.690 <i>(100%)</i> | 385,84 | 3,75 |

3. Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan

Pada bulan September 2016, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 22,31 persen. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Makanan adalah rokok kretek filter (13,10%), daging ayam ras (7,04%), daging sapi (6,52%), telur ayam ras (5,19%), mie instan (4,34%), ikan kembung (2,86%), cabe merah (2,62%), dan bawang merah (2,31%), serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet) (2,29%).

Gambar 1
Lima Komoditi Makanan dan Non Makanan
Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan
di DKI Jakarta Maret 2016 - September 2016



Untuk komoditi bukan makanan, komoditi barang/jasa yang mempunyai peranan terbesar adalah perumahan (36,73%), listrik (10,49%), angkutan (8,43%), pendidikan (6,98%), bensin (6,94%), perlengkapan mandi (3,66%), pakaian jadi perempuan dewasa (3,05%), kesehatan (2,97%), pakaian jadi laki-laki dewasa (2,71%) dan pakaian jadi anak-anak (2,60%).

4. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

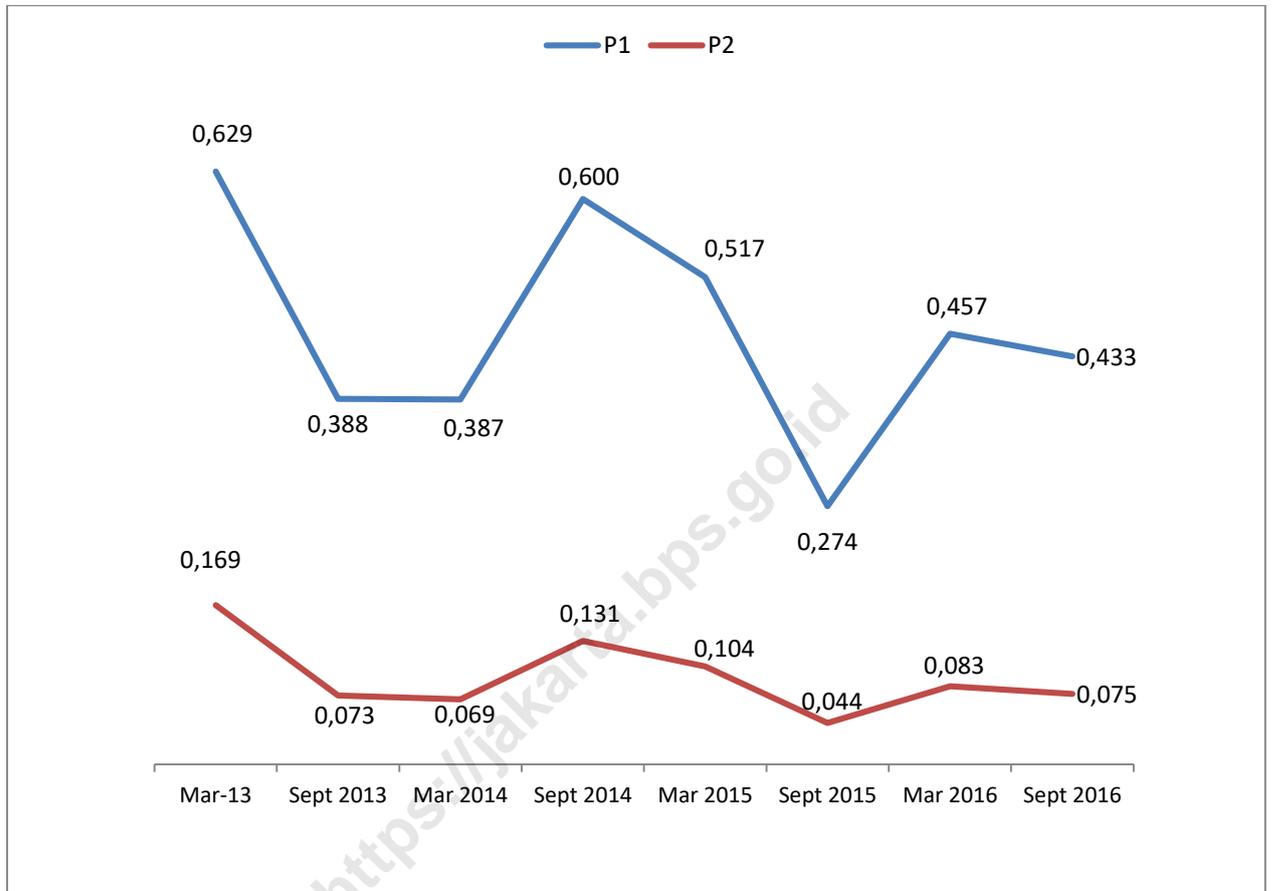
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 2
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di DKI Jakarta, September 2015 - Maret 2016 - September 2016

| Bulan | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) | Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂) |
|---------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| September 2015 | 0,274 | 0,044 |
| Maret 2016 | 0,457 | 0,083 |
| September 2016 | 0,433 | 0,075 |
| Perubahan: | | |
| Maret 2016 - September 2016 | -0,024 | -0,008 |
| September 2015 - September 2016 | 0,159 | 0,031 |

Pada periode Maret 2016 - September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) menunjukkan penurunan, sedangkan pada periode September 2015 - September 2016 menunjukkan peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,024 poin dari 0,457 pada Maret 2016 menjadi 0,433 pada September 2016, dan naik sebesar 0,159 poin dari 0,274 pada September 2015 menjadi 0,433 pada September 2016. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun 0,008 poin dari 0,083 menjadi 0,075 (Maret 2016 - September 2016), dan naik sebesar 0,031 poin dari 0,044 menjadi 0,075 (September 2015 - September 2016). Peningkatan nilai kedua indeks tersebut pada periode September 2015 - September 2016 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin tinggi.

Gambar 2
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta, 2013 - 2016 (Maret dan September)



DATA

Mencerdaskan Bangsa

<https://jakarta.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No 36-38 Senen Jakarta Pusat
Telp: (021) 31923493, Fax: (021) 3152004
Homepage: <http://jakarta.bps.go.id>
Email: bps3100@bps.go.id